

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Example of the second second second section in the second second

THE STREET

THE STATE OF THE STATE AND A PART OF THE STATE OF THE STA

MOTOR TO TAKE INCLUDED THE SECOND

Mil to the factor of

Dereturen Bupan Tanjung Jabung Barat Nomio 1 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Kinena Diserah Bagi Pegawat Nesan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Keputasan Bupati tentang Besaran Tunjangan Kinena Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018;

Montenana

- 1. Unding-Undang Nomor 12 Tahun 1956 remang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Permittan Rupon Tanjung Jabang Balat Jahan Buga 1884, Irahang Pemberaan Tunjungan Kanerja Daerah Buga Perlas n Neperi Sipil di Lingkuntan Pemerintah Daerah Kamppaten Janjung Jabang Barat (Berna Daerah
- 15 Peratus in Ropati Tamiung Jahung Batai James 79 Cintin 2017 Ten ing Pengiharan Anggaran Pendapatan dan Refini Hinrah Kabupatea Tanjung Jahung Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Latan Barat tahun 2017 Namor 79).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digolongkan dengan Kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini;

KEDUA

Besaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS dan Staf yang dipekerjakan/diperbantukan dari instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;

KETIGA

Setiap PNS wajib menyampaikan Hasil Penilaian Kinerja kepada Bendaharawan Gaji setiap bulan sebagai pertimbangan untuk pemberian TKD;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018;

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

> Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT.

ttd.

SAFRIAL